



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO SETIYARSO
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA, INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
3. NHK : 801434

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	176.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
3. MOBIL, HONDA FREED SUV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000		
4. MOTOR, HONDA SCOOPY SPD MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.050.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	4.500.000
Sub Total	Rp.	901.550.000

III. HUTANG **Rp.** **71.127.600**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **830.422.400**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.